

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK**

2024



Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P, S.Pi., M.Si.

Akmal Fathu Rohman, S.Si.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Ratih Tribuwana Dhewi, S.Kel.

Kontributor:

Sub-bagian Umum BPSPL Pontianak

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan Kerjasama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 18 Juli 2024
Kepala BPSPL Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **13 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu **105,24%** (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan I yaitu:

1. Penyerahan Bantuan kompak dengan capaian sebanyak **1 kelompok** dari target 1 kelompok sehingga tercapai **100%**.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian sebesar **92,55** dari target sebesar 82 sehingga tercapai **112,87%**.
3. Nilai IP ASN dengan capaian sebesar **85,12** dari target sebesar 83 sehingga tercapai **102,55%**.
4. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 1 laporan sehingga tercapai **100%**.
5. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian **116,67** dari target 94 sehingga tercapai **120%**.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian **100%** dari target 80% sehingga tercapai **120%**.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp 18.598.113.000**. Realisasi anggaran pada Triwulan II berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 Juni 2024 yaitu **Rp 8.279.084.471** atau **44,52%** dari pagu bruto. Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Hal itu dikarenakan masih belum ada dasar hukum yang kuat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Pelayanan Perizinan di Perairan Darat.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan III dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan I tahun 2024 yaitu telah mengusahakan untuk buka blokir anggaran pada REA.003. Anggaran sudah dibuka pada bulan Juni dan berubah menjadi SCC.001. Selain itu, peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat.

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	I
Kata Pengantar.....	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar.....	VI
Daftar Tabel.....	VII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.1.1. Kedudukan	1
1.1.2. Tugas	1
1.1.3. Fungsi.....	1
1.2. Susunan Organisasi	3
1.3. Keragaman SDM	4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4
1.4.1. Potensi	4
1.4.2. Permasalahan	5
1.5. Dasar Hukum.....	6
1.6. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	8
2.1.1. Visi.....	9
2.1.2. Misi.....	9
2.1.3. Tujuan	10
2.1.4. Sasaran Strategis.....	10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja.....	16
2.3.1. Rumusan Pengukuran.....	16
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Pontianak	21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	24

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	29
3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	33
3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	39
3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	41
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak	53
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak	58
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak	66
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	71
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak.	73
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	113
3. 2. Realisasi Anggaran.....	116
BAB IV PENUTUP.....	116
4.1. Kesimpulan.....	116
4.2. Rekomendasi.....	116
4.3. Tindak Lanjut	116
LAMPIRAN.....	117

Daftar Gambar

Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	3
Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak.....	4
Gambar 3.1.1 1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerja).....	18
Gambar 3.1.1 2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II	19
Gambar 3.1.1 3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II	20
Gambar 3.1.1 1. Tren Capaian PNBK dari Tahun 2022	22
Gambar 3.1.2 1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya	26
Gambar 3.1.2 2. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya	26
Gambar 3.1.2 3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang	27
Gambar 3.1.2 4. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang.....	28
Gambar 3.1.2 5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut	28
Gambar 3.1.2 6. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut.....	29
Gambar 3.1.2 7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan	29
Gambar 3.1.2 8. Realisasi Anggaran IKU II Triwulan II	30
Gambar 3.1.3 1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL.....	32
Gambar 3.1.3 2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.....	33
Gambar 3.1.3 3. Sosialisasi KKPRL	33
Gambar 3.1.3 4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan II	34
Gambar 3.1.4 1. Aspek Penilaian EVIKA.....	35
Gambar 3.1.4 2. Pengamatan Populasi Pesut.....	38
Gambar 3.1.4 3. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu.....	39
Gambar 3.1.4 4. Survei Pendataan Ikan Ekonomi Penting	39
Gambar 3.1.4 5. Survei Sosial Ekonomi.....	40
Gambar 3.1.4 6. Grafik Profil Responden Survei Sosial Ekonomi	40
Gambar 3.1.4 7. Grafik Pengetahuan Jenis Ikan Dilindungi	41
Gambar 3.1.4 8. Grafik Persepsi Manfaat Kawasan Konservasi	41
Gambar 3.1.4 9. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi	42
Gambar 3.1.4 10. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan II.....	43
Gambar 3.1.5 1. Fasilitas Usulan Penetapan KKP3K di Kalimantan Utara	45
Gambar 3.1.5 2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan II	46
Gambar 3.1.6 1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama	48
Gambar 3.1.6 2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 hingga Triwulan II	49
Gambar 3.1.6 3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan	51
Gambar 3.1.6 4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan II	52
Gambar 3.1.7 1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan II tiap Tahun	54
Gambar 3.1.7 2. Serah Terima Bantuan KOMPAK.....	55
Gambar 3.1.7 3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II	56
Gambar 3.1.8 1. Survei Populasi Penyus di Kalimantan Barat.....	60
Gambar 3.1.8 2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar.....	61
Gambar 3.1.8 3. Grafik Penanganan Biota Terdampar	61
Gambar 3.1.8 4. Sosialisasi Biota Dilindungi.....	62
Gambar 3.1.8 5. Bimtek Penanganan Biota Dilindungi.....	62
Gambar 3.1.8 6. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat.....	63
Gambar 3.1.8 7. Dokumentasi pengukuran	63
Gambar 3.1.8 8. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap	63
Gambar 3.1.8 9. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar.....	64
Gambar 3.1.8 10. Dokumentasi Pengukuran.....	64

Gambar 3.1.8 11. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II	65
Gambar 3.1.9 1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi	68
Gambar 3.1.9 2. Pemeriksaan SAJI	69
Gambar 3.1.9 3. Grafik Pendapatan PNBK	70
Gambar 3.1.10 1. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	73
Gambar 3.1.11 1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya	75
Gambar 3.1.11 2. Grafik data pengumpulan sampah	76
Gambar 3.1.11 3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang	77
Gambar 3.1.11 4. Grafik data pengumpulan sampah	77
Gambar 3.1.11 5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut	78
Gambar 3.1.11 6. Grafik data pengumpulan sampah	78
Gambar 3.1.11 7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan	79
Gambar 3.1.11 8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	79
Gambar 3.1.12 1. Nilai IKPA Tahun 2024	82
Gambar 3.1.12 2. Tren Nilai IKPA	82
Gambar 3.1.12 3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	85
Gambar 3.1.12 4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	89
Gambar 3.1.12 5. Tren IP ASN	91
Gambar 3.1.12 6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	93
Gambar 3.1.12 7. Kegiatan Evaluasi AKIP	96
Gambar 3.1.12 8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	97
Gambar 3.1.12 9. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II	107

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024	14
Tabel 3.1.1 1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak.....	22
Tabel 3.1.1 2 Progres Capaian PNPB BPSPL Pontianak Triwulan II	23
Tabel 3.1.2 1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak.....	24
Tabel 3.1.2 2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya	26
Tabel 3.1.2 3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang	27
Tabel 3.1.2 4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut	28
Tabel 3.1.2 5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan	29
Tabel 3.1.2 6. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan II	30
Tabel 3.1.3 1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak.....	31
Tabel 3.1.3 2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan II	32
Tabel 3.1.3 3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan II	33
Tabel 3.1.4 1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria	35
Tabel 3.1.4 2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA	36
Tabel 3.1.4 3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	36
Tabel 3.1.4 4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak.....	36
Tabel 3.1.4 5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut	38
Tabel 3.1.4 6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu.....	39
Tabel 3.1.4 7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan II	42
Tabel 3.1.5 1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak.....	44
Tabel 3.1.5 2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan II	45
Tabel 3.1.6 1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak.....	47
Tabel 3.1.6 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan II	49
Tabel 3.1.6 3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak.....	50
Tabel 3.1.7 1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak.....	53
Tabel 3.1.7 2. Realisasi IKU 8 Triwulan II.....	55
Tabel 3.1.7 3. Realisasi IKU 9 Triwulan II.....	58
Tabel 3.1.8 1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak.....	59
Tabel 3.1.8 2. Realisasi IKU 10 Triwulan II.....	64
Tabel 3.1.9 1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak.....	66
Tabel 3.1.9 2. Realisasi IKU 11 Triwulan II.....	70
Tabel 3.1.10 1. Capaian IKU 12 PNPB BPSPL Pontianak	71
Tabel 3.1.10 2. Capaian IKU 12 Triwulan II	72
Tabel 3.1.11 1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak	74
Tabel 3.1.11 2. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL	75
Tabel 3.1.11 3 Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Singkawang	76
Tabel 3.1.11 4. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kab. Tanah Laut	77
Tabel 3.1.11 5. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Balikpapan	78
Tabel 3.1.11 6. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan III	79
Tabel 3.1.12 1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak.....	81
Tabel 3.1.12 2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan II	85
Tabel 3.1.12 3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak	86
Tabel 3.1.12 4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak.....	88
Tabel 3.1.12 5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan II	89

Tabel 3.1.12 6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak.....	90
Tabel 3.1.12 7. Realisasi Anggaran IKM 17	92
Tabel 3.1.12 8. Kategori Nilai PM SAKIP	93
Tabel 3.1.12 9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak.....	94
Tabel 3.1.12 10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan II	97
Tabel 3.1.12 11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak.....	98
Tabel 3.1.12 12. Efisiensi dari capaian IKM 19 Triwulan II.....	99
Tabel 3.1.12 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan II	99
Tabel 3.1.12 14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak.....	100
Tabel 3.1.12 16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak.....	102
Tabel 3.1.12 17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak.....	104
Tabel 3.1.12 18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah.....	105
Tabel 3.1.12 19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak.....	106
Tabel 3.1.12 20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan II	107
Tabel 3.1.12 21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan.....	108
Tabel 3.1.12 22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak.....	108
Tabel 3.1.12 23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan II	109
Tabel 3.1.12 1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain ..	111
Tabel 3.23.1.12 1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan II	113
Tabel 3.1.122 3.1.12 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023	114

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sejak terbitnya Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

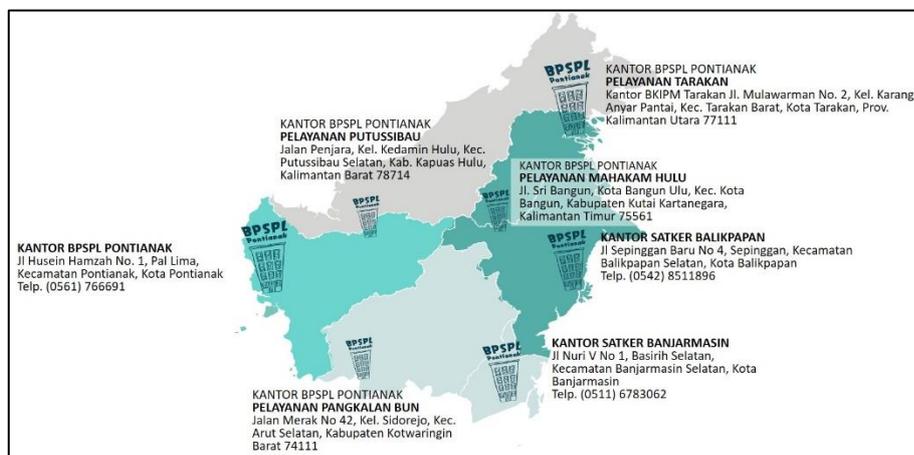
- g. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of International Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
- e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat atau BPSPL Pontianak memiliki satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

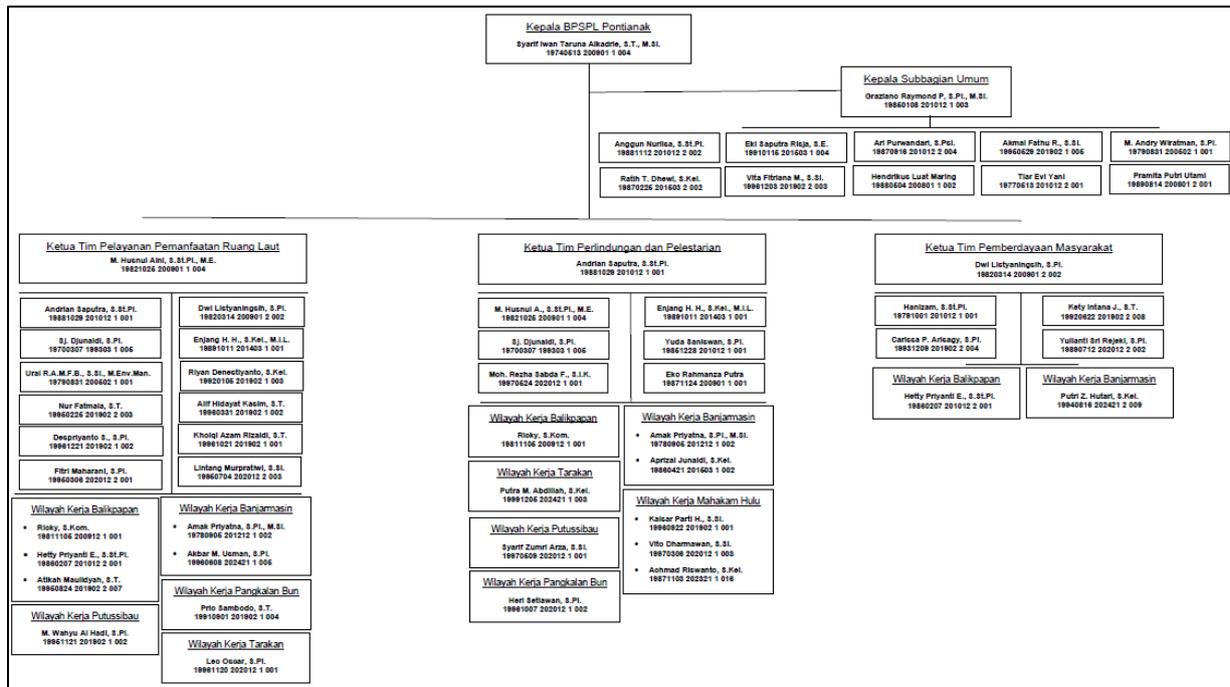


Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).

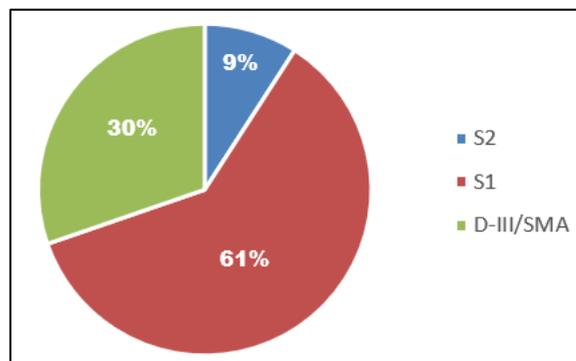
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tersebut, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2023 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 70 orang terdiri dari 48 ASN (44 PNS dan 4 PPPK) dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun perincian PPNPN yang berjumlah 21 orang merupakan Satpam, Pramubakti dan Petugas Kebersihan, Pramudata/Petugas Pelayanan, dan Pengemudi. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Untuk komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik di bawah sebagai berikut:



Gambar 1.1.3-3. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30

Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
- e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
- h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2023 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mentaeri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
- h. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran
- ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020- 2025 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2020 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah **“Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”**.

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
 - b. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:

- a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard (BSC)*. PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKM). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Tahun 2023	Tahun 2024
Tidak digunakan	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak	(SK-8) Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Maret 2023 dan Maret 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
(IKU-1) Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)	Tidak digunakan, diganti dengan (IKU-1) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
(IKU-2) Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak digunakan
Tidak Terdapat IKU	(IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)
(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat IKU	(IKU-4) Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
(IKU-4) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-5) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-5) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-6) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-6) Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp)	(IKU-7) Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp000)
(IKU-7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-8) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKU-8) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-9) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IK-9) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-10) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak Terdapat IKU	(IKM-11) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)
(IK-10) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IKM-12) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
(IK-11) Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak digunakan, diganti dengan (IKM-13) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IK-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKM-14) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IK-13) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	(IKM-15) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
(IK-14) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IKM-16) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
(IK-15) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-17) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IK-16) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-18) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Maret 2024

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Pontianak	1.	Nilai PNBPN BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.000.000
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	320
3.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3
4.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6.	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
		7.	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
7.	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2
		9.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12.	Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,76
		15.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	86
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
		17.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
		18.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	80
	24. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	65

Sumber data: BPSPL Pontianak - DJPKRL, Maret 2024

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

2.3.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Score Card (BSC).

2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
 - b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level IV sampai ke level 0); dan

c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan system informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

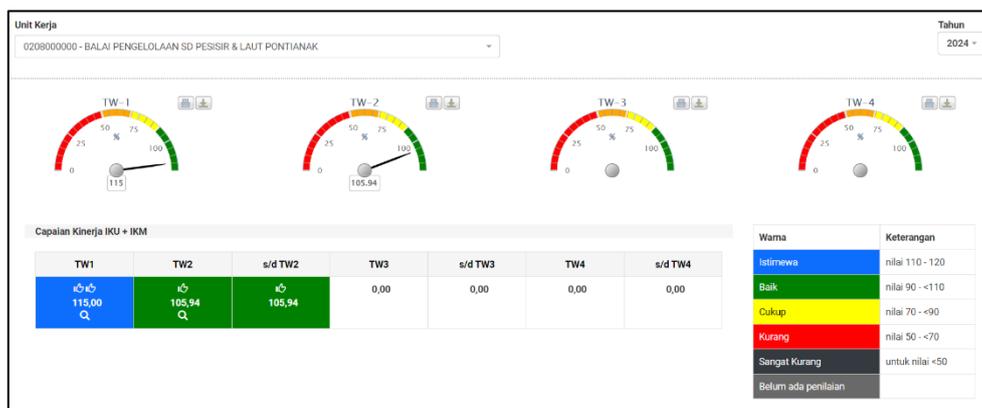
Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara *online* yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

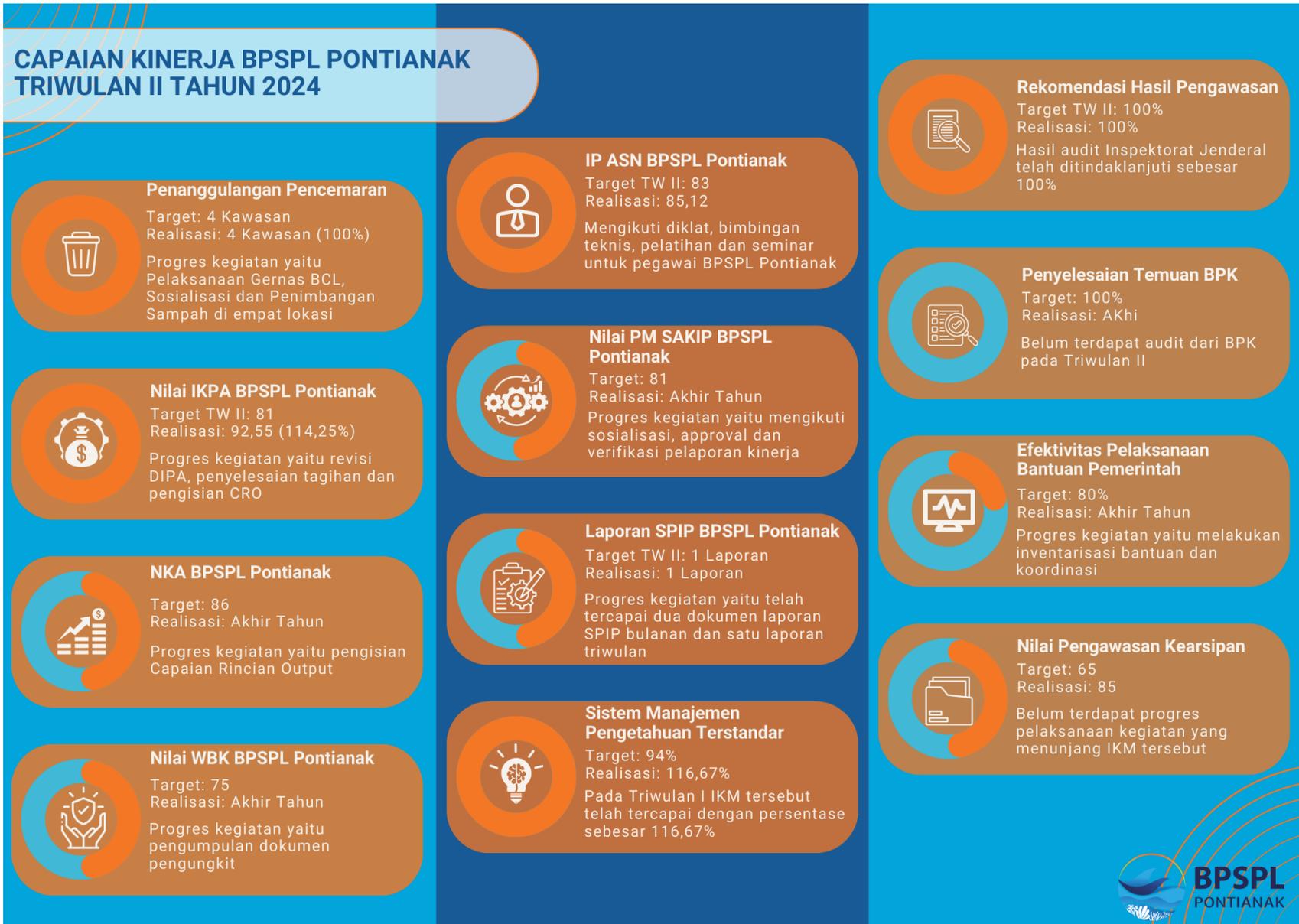


Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu **105,24%** (masuk kategori Biru = **Istimewa**), mengalami penurunan sebesar 9,76% dari Triwulan I. NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan II) sebesar 116%. Terdapat penurunan 10,76% dari Triwulan II Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena penurunan capaian dari target dan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 6 Indikator yang memiliki periode penilaian Triwulan II. Terdapat 6 Indikator Kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan II dapat dilihat pada infografis di bawah ini.



Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II



Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

$$PNBP_{BPSPL\ Pontianak} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

dimana,

$$PNBP_{Layanan} = SAJI\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

Keterangan:

SAJI DN = Pungutan atas Dokumen SAJI DN ¹⁾ + Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan ²⁾

Surat Rekomendasi = Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan

$PNBP_{Layanan}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan

$PNBP_{BMN}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

$PNBP_{Lainnya}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan = Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Pungutan Perdagangan = Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Denda = Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Permohonan

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Pontianak									
IKU-1	Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp000)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	.Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
2.374.620.820	Periode Capaian Tahunan			2.000.000	0	-	-	-	-	

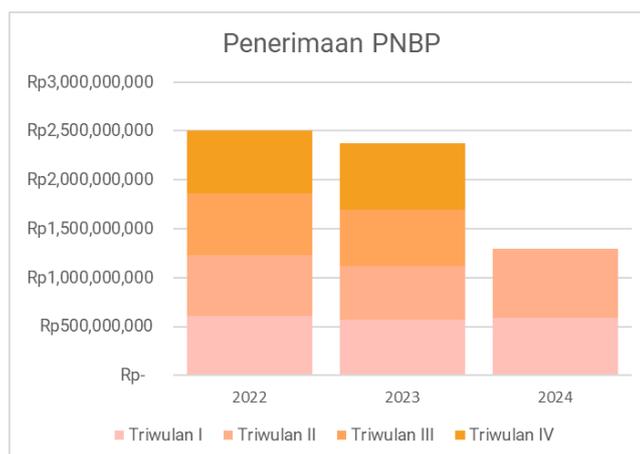
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PNBSP Triwulan II (per tanggal buku 1 Januari – 30 Juni 2024) yaitu senilai Rp1,284,026,677 atau 64,20% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBSP Triwulan II tahun 2024 (Rp1,284,026,677) mengalami peningkatan sebesar 114,47% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBSP Triwulan I tahun 2023 (Rp1,121,633,400).



Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBSP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian kinerja riwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRKL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian

kinerja riwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progress nilai PNBP Triwulan II tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 64,20% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 64,20% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk menerbitkan dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Januari – Maret 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan II 2024.

Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan II

Jenis PNBP	Januari	Februari	Maret
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp166,667	Rp166,667	Rp500,001
Pendapatan Perizinan Lainnya	Rp119,070,000	Rp135,405,000	Rp124,335,000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Rp100,940,315	Rp135,707,140	Rp77,165,975
Total	Rp220,176,982	Rp271,278,807	Rp202,000,976
Total TW II	Rp693,456,765		

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan II Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Juli – September 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Menghitung

$$TK_{\text{BPSPL Pontianak}} = TK_{\text{Lokasi 1}} + TK_{\text{Lokasi 2}} + TK_{\text{Lokasi 3}} + TK_{\text{Lokasi 4}}$$

Keterangan:

$TK_{\text{BPSPL Pontianak}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{\text{Lokasi 1,2,3,4}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			320	0	-	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya: pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang, Kab. Tanah Laut dan Kota Balikpapan. Progres jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 320 nelayan tradisional (100% dari target sebesar 320 orang) yang tersebar merata sebanyak masing-masing 80 orang di empat lokasi Bulan Cinta Laut.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum

dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPRKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jeruju Besar	KUB Galak Super	10
	KUB Kakap Merah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prospek usaha pengelolaan sampah oleh mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

➤ *Kegiatan Penimbangan dan Evaluasi Pelaksanaan*

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 23.461,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.863.000. KUB Berembang Laut II menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.875,2 kg.



Gambar 3.1.2-2. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya

b. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapuk Besar	KUB Surya Perdana	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mutiara	11
Kel. Naram	KUB Naram Jaya Abadi	22
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bawal	10
	KUB Barakuda	10

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 15 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.993,65 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 57% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.525.800. KUB Nelayan Bawal menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.233 kg.



Gambar 3.1.2-4. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Bakau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Citra Lestari	34
Desa Bawah Layung	KUB Bina Harapan Bersama	6

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.860,5 kg total sampah terkumpul.

Sebanyak 2.393 kg sampah berupa residu dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.2-6. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut

d. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggang sebanyak 80 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sepinggang	KUB Minasari	26
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Seraya	18
	KUB Lee Batakan Fajar	12
	KUB Anugrah Sinergi	12

➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, analisis usaha pengelolaan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

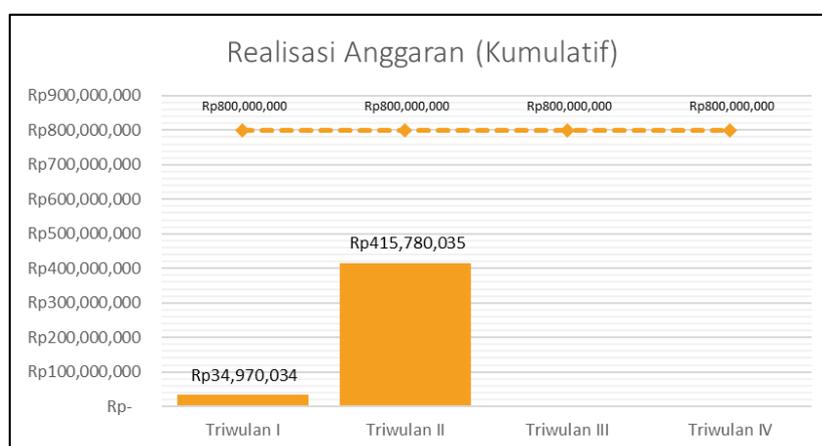
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitas Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 415.780.035 (51,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp415.780.035 (51,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp Rp415.780.035 atau 51,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1.2-8. Realisasi Anggaran IKU II Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan kegiatan evaluasi dan penutupan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan penutupan dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gernas BCL dengan melibatkan nelayan lokal, instansi daerah dan *stakeholder* lain yang terkait.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan

pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	.Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya: koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi lapangan permohonan KKPR di Kalimantan Utara, Sosialisasi KKPR di Kota Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan penilaian teknis secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 19 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 14 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Barat sebanyak satu pemohon.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan II

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	1	April
Kalimantan Timur	14	April - Juni
Kalimantan Utara	4	Mei - Juni
Total	19	April - Juni

Kegiatan ini juga didukung lebih lanjut dengan Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL. Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL PT Sean Pesisir Tangguh di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 6 Juni 2024.



Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang laut sebanyak 19 subjek yang berada di Kalimantan Tengah (5 subjek), Kalimantan Selatan (2 Subjek), Kalimantan Timur (2 Subjek) dan Kalimantan Utara (7 Subjek). Sebanyak 2 subjek merupakan Lembaga pemerintahan (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Pangkalan TNI Angkatan Laut). Sementara 17 subjek lainnya merupakan perusahaan dan perseorangan.



Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Sosialisasi KKPRL

BPSPL Pontianak sebagai UPT Lingkup Ditjen PKRL menghadiri undangan sosialisasi KKPRL yang diselenggarakan oleh Tim kerja Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut, Dit. PRL kepada Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO). IPERINDO merupakan asosiasi yang beranggotakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berupa galangan kapal di seluruh Indonesia. Sosialisasi yang disampaikan meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.



Gambar 3.1.3-3. Sosialisasi KKPRL

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: koordinasi pelaksanaan pelayanan ruang laut di Jakarta Pusat pada tanggal 2 s.d. 5 April 2024 dan koordinasi pelaksanaan KKPRL di Makassar pada tanggal 16 s.d. 19 April 2024.

8. Realisasi Anggaran

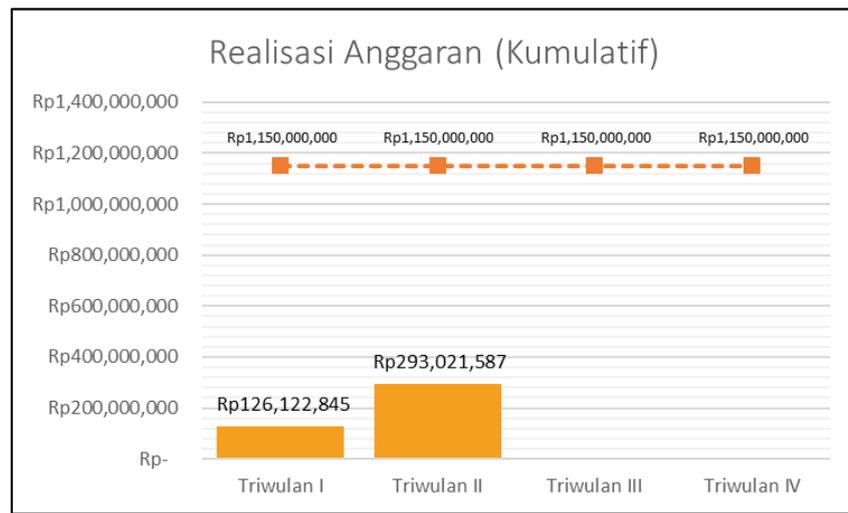
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2366.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2366.PBT.009.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 174.774.000	Rp 34.302.290 (19,63%)	-

2.	[2366.PBT.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 375.226.000	Rp 130.771.140 (34,85%)	-
3.	[2366.PBT.009.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 600.000.000	Rp 127.948.157 (21,32%)	-
TOTAL		Rp 1.150.000.000	Rp293.021.587 (25,48%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp293.021.587 atau 25,48% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.150.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Sewa.



Gambar 3.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan II

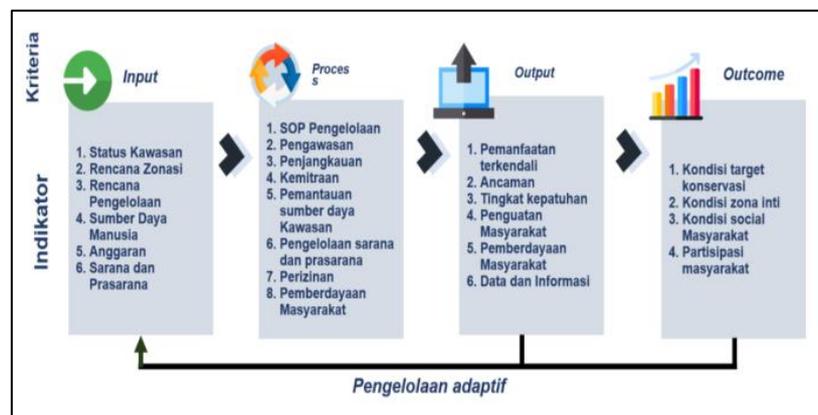
9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi teknis permohonan KKPRL lanjutan untuk bulan Juli – September, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPKRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
Output	6	15-20	13
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA

Kriteria	Ni	Nmax	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

- Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
- Nilai Maksimum (nMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
- Nilai Kriteria (NK) : $Ni / nMax \times 100\%$
- Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
- Nilai Akhir Kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$
- Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	.Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
36,44	Periode Capaian Tahunan			14	-	-	-	17,8 jt Ha	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya: survey jenis biota dilindungi, monitoring kualitas air, pendataan ikan ekonomis penting, survei sosial ekonomi dan sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Mahakam Hulu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 50,44%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,8 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam pengukuran kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut sudah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 36,44%. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, perlu peningkatan alat penunjang survei terutama dalam monitoring Pesut Mahakam. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam pada periode April - Juni 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati

dari sisi kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.



Gambar 3.1.4-2. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang diamati berlokasi di Hulu Rimba Ayu sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pesut yaitu pukul 16.37.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No.	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	Sangkuliman	9	12.12	Sighting
2.	Sungai Kedang Rantau	2	16.37	Sighting
3.	Muara Wis	6	17.58	Sighting
4.	Hulu Rimba Ayu	14	10.49	Sighting
5.	Muara Danau Semayang	5	08.17	Sighting
6.	Muara Pela	3	10.01	Sighting
7.	Liang Ulu	3	10.39	Sighting

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sejenisnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukkan nilai suhu berkisar antara 20,4 – 31 C. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,7 – 5,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,8 – 7,25. Sementara nilai TDS berkisar antara 13 – 45 ppm.

b. Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survei monitoring kualitas air di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada periode bulan April – Juni 2024. Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 16 titik stasiun. Parameter yang diukur mencakup kecepatan arus, kejernihan, suhu air, konduktivitas, oksigen terlarut, dan total bahan terlarut. Alat yang digunakan yaitu *Water Quality Checker*, kamera dan GPS.



Gambar 3.1.4-3. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu

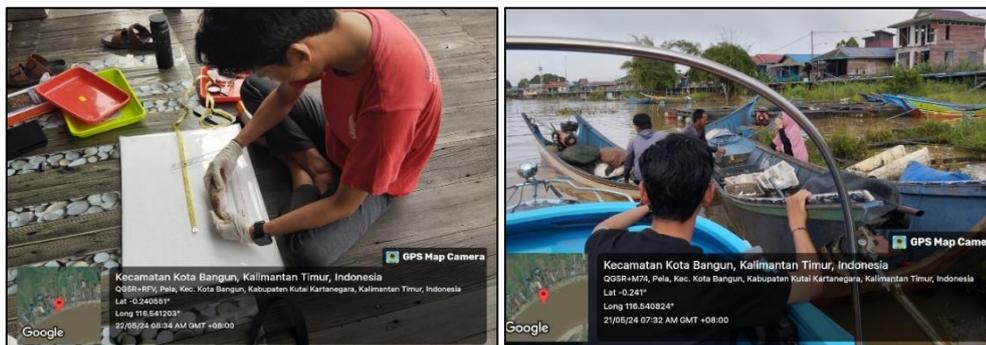
Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang triwulan II tahun 2024 diketahui bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di dalam ambang kelayakan baku mutu kelas dua merujuk PP Nomor 22 tahun 2021.

Tabel 3.1.4-6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Parameter	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Suhu (oC)	33,5	27,6	23,39
pH	6,89	5,6	6,64
TDS (mg/L)	39,8	13,3	24
DO (m/L)	15,8	2,8	5,57
EC (S/m)	79,4	26,9	43,25
Kuat Arus (m/s)	1,94	0	0,75

c. Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Survei ikan ekonomis penting dilakukan di sepanjang perairan Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Mei 2024 dengan mengambil sampel yang berasal dari nelayan sekitar. Sampel ikan kemudian diukur secara meristik dengan rincian kolom parameter yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang hingga pangkal ekor, panjang hingga belahan ekor, jari jari keras pada sirip, jari jari lemah mengeras pada sirip, jari jari lemah pada sirip, perumusan sirip Dorsal, Pectoral, Ventral, Anal, dan Caudal (D-P-V-A-C). Selain itu, pengukuran gonad, dan pemberian kelas TKG. Selain itu, tim juga menanyakan alat tangkap apa yang digunakan.



Gambar 3.1.4-4. Survei Pendataan Ikan Ekonomi Penting

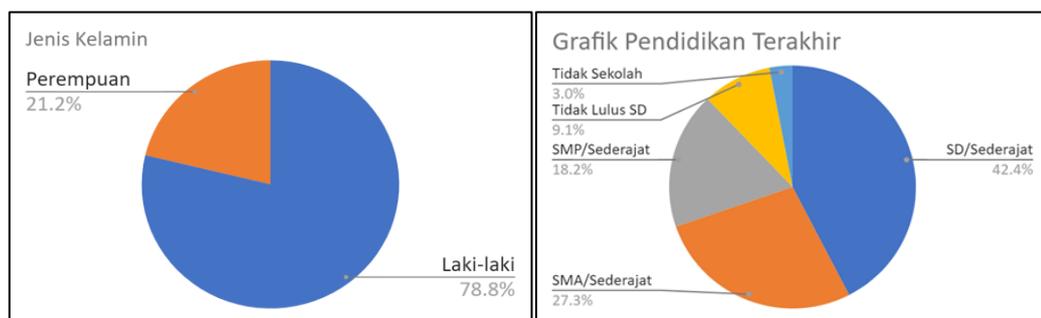
d. Survei Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 19 April (Desa Liang Ilir, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara), 20 Mei (Desa Pela, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara), dan 18 Juni (Desa Liang Ilir, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara). Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan alat peraga berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku perikanan dan pariwisata sebagai subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara *purposive sampling*, sehingga sampel data dianggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Responden yang ditarget untuk kegiatan wawancara adalah minimal sejumlah 30 hingga maksimal 40 orang.



Gambar 3.1.4-5. Survei Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu adalah laki-laki (78,8%) dengan perempuan sebanyak 21,2%. Kebanyakan responden pria berprofesi sebagai nelayan dan usia mereka berkisar antara 26 hingga 65 tahun. Pendidikan mereka sebagian besar hanya sampai SD, dilanjutkan dengan SMP dan SMA. Pendapatan dari penangkapan ikan yang merupakan sumber utama penghasilan berfluktuasi tergantung musim dan hasil tangkapan. Nelayan menjual ikan seperti haruan, sepat siam, lele, biawan, baung, pepuyu, dan udang kepada pengepul untuk tujuan domestik. Nelayan budidaya terutama mengembangkan ikan patin, nila, dan baung.



Gambar 3.1.4-6. Grafik Profil Responden Survei Sosial Ekonomi

Sekitar 93,9% masyarakat mengetahui tentang perlindungan pesut dan jenis ikan lain seperti Belida, namun hanya 40% yang memahami peraturan dan regulasi yang berlaku. Masyarakat mengenali biota dilindungi seperti Belida Kalimantan (*Chitala borneensis*) dan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*), namun sebanyak 87,9% memanfaatkannya

untuk konsumsi atau dijual. Pari Air Tawar (*Urogymnus polylepis* dan *Fluvitrygon oxyrinchus*) dan Sidat (*Anguilla sp.*) serta ikan Pasa (*Schismatorhynchos heterorhynchos*) umumnya hanya tertangkap sebagai bycatch.



Gambar 3.1.4-7. Grafik Pengetahuan Jenis Ikan Dilindungi

Sekitar 71,9% responden belum mengetahui keberadaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Setelah diberi penjelasan, 75% memandangnya positif, meskipun hanya 60% yang benar-benar memahami dampak positifnya. Mayoritas responden juga menyadari bahwa penangkapan ikan ilegal merusak ekosistem, tetapi hanya 58,1% yang memahami peraturan dan sanksi terkait. Persepsi tentang manfaat jangka panjang kawasan konservasi bervariasi, dengan 64,5% setuju bahwa kawasan konservasi meningkatkan kualitas hidup, namun ada yang skeptis karena pembatasan akses dan dampak ekonomi negatif.



Gambar 3.1.4-8. Grafik Persepsi Manfaat Kawasan Konservasi

Sebanyak 46,9% responden memandang kurangnya perkembangan infrastruktur penunjang pariwisata di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu, sementara 37,5% berpendapat sektor pariwisata tidak berkembang. Masyarakat berharap adanya peningkatan infrastruktur pariwisata untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, 37,5% responden merasa kontribusi pariwisata kurang berdampak pada lapangan pekerjaan. Mereka menilai potensi pariwisata terbatas karena kurangnya point of interest selain perairan danau dan Tanjung Tamanoh. Meski demikian, 56,3% responden percaya sektor pariwisata memperhatikan tenaga kerja lokal dan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang mendukung konservasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Juni 2024 di Desa Kota Bangun Ilir dan Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, hal-hal

yang disampaikan dalam kegiatan diantaranya: pengelolaan kawasan konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya konservasi pesut mahakam dan habitatnya.



Gambar 3.1.4-9. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Selain itu, penjangkauan materi kawasan konservasi dilakukan melalui pemberian bahan cetak dalam bentuk poster dan X-Banner kepada masyarakat yang terdiri dari tamu dan stakeholder. Sosialisasi di Desa Kota Bangun Ilir menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi, yang ditandai dengan keaktifan peserta sosialisasi saat dilaksanakan diskusi terbuka.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan April hingga Juni 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan diantaranya: Televisi, Kursi, Drawer, Lemari, Laptop, CCTV dan Alat Pengukur Arus.

8. Realisasi Anggaran

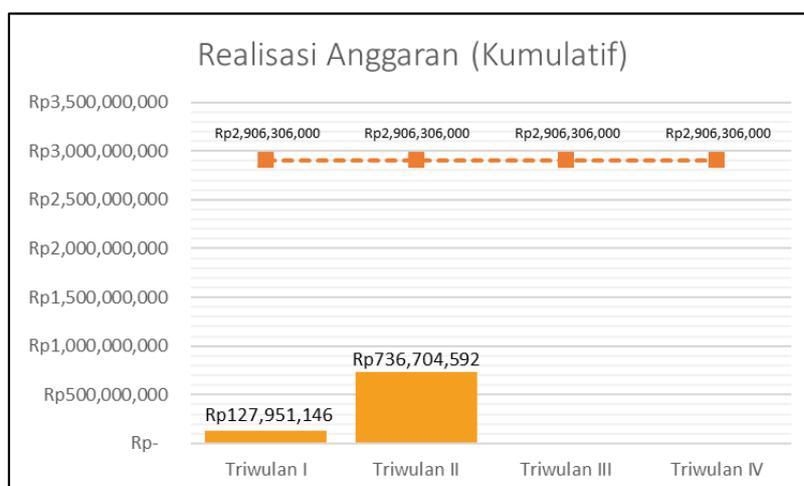
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.PBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [2362.REA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 48.500.000	Rp 11.122.618 (22,93%)	-
2.	[2362.PBW.001.058] Pelayanan Peizinan Berusaha Kawasan Konservasi	Rp 19.500.000	Rp 0 (0%)	-
3.	[2362.PBW.001.065] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp 181.000.000	Rp 0 (0%)	-

4.	[2362.REA.002.051] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 593.000.000	Rp 386.406.322 (65,16%)	-
5.	[2362.REA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp 715.368.000	Rp 112.073.662 (15,67%)	-
6.	[2362.REA.002.053] Pemberdayaan Masyarakat	Rp 809.044.000	Rp 226.023.590 (27,94%)	-
7.	[2362.REA.002.054] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp 363.894.000	Rp 1.078.400 (0,30%)	-
TOTAL		Rp 2.906.306.000	Rp736.704.592 (25,35%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp736.704.592 atau 25,35% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.906.306.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.4-10. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan III diantaranya: monitoring sosial ekonomi, pendataan jenis ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi rencana pengelolaan dan survei biota dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-5	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	.Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
3	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu melakukan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjungselor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 29,3 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan

Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjungselor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 9 – 12 Juni 2024. Terdapat dua Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan luas total sekitar 25.482,08 hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan Binusan dan Pulau Sinelak, serta Kawasan Konservasi di Perairan Tanjung Palas Timur. Usulan kawasan konservasi perairan baru di Pulau Cermin dengan luas 1163,59 hektar sedang diproses.



Gambar 3.1.5-1. Fasilitasi Usulan Penetapan KKP3K di Kalimantan Utara

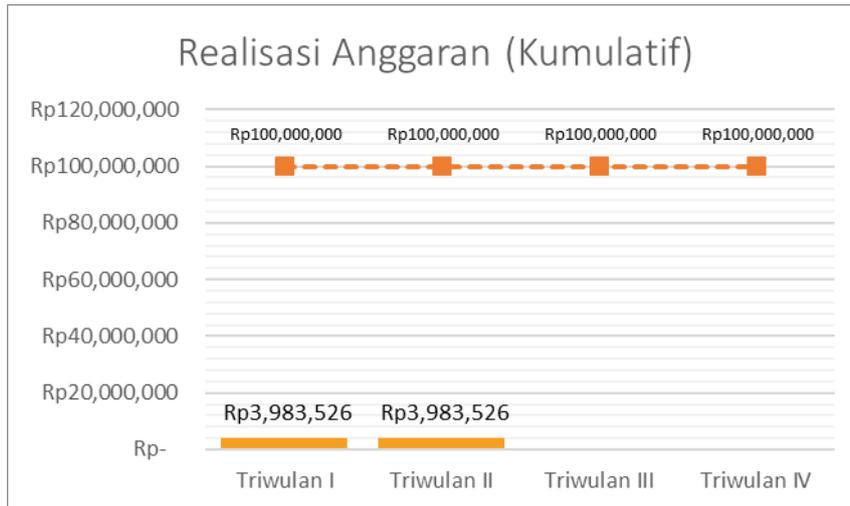
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.UBA.001] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp 3.983.526 (3,98%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 3.983.526 (3,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 3.983.526 atau 3,98% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.5-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-6	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	.Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	2	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan II, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun terdapat progress kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama, sehingga progress capaian untuk IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)".

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan

dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPKRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.



Gambar 3.1.6-1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Berdasarkan Komponen/Subkomponen.

Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEC.001.051.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-
TOTAL		Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 6 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp69.223.671 atau 98,89% dari pagu anggaran Rp70.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan/Narasumber); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transpor Peserta).



Gambar 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 hingga Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2024.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPKRL, Direktorat lingkup DJPKRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

IKU 7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-7	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	2	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan II, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun progress kegiatan telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga progress untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sesuai Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga Triwulan II tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draft Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draft Perjanjian Kemitraan tersebut telah diajukan permohonan paraf kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sesuai Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.



Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

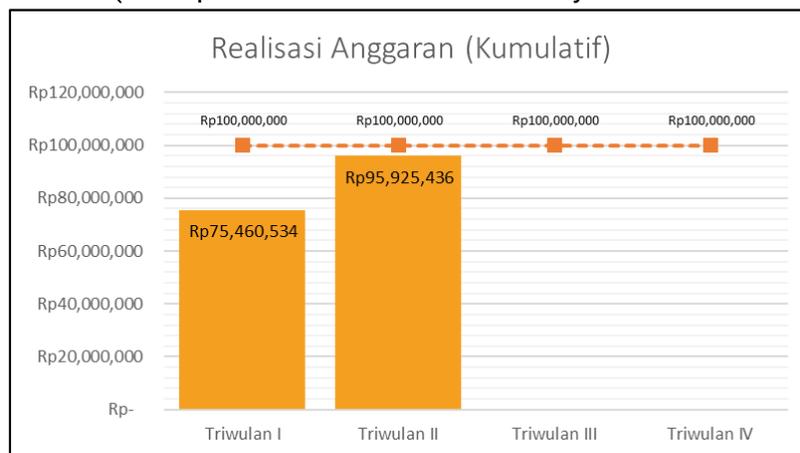
8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut.

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEE.001.051.A] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp95.925.436 (95,92%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp95.925.436 (95,92%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp95.925.436 atau 95,92% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Paket Fullday di Kalimantan Timur).



Gambar 3.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan III Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	1	1	100	2	50	3	33,33	-	

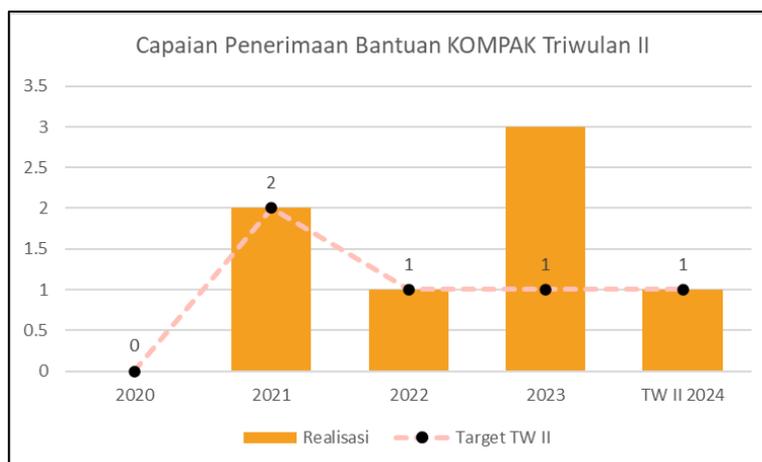
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 telah dilakukan pengukuran dengan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah diserahkan Bantuan Pemerintah dari target Triwulan I sebesar 1 (kelompok) dan target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi terhadap target triwulanan sebesar 100% dan terhadap target tahunan sebesar 50%. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Padaidi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 2 kelompok atau 66% menurun. Tren capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024.



Gambar 3.1.7-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan II tiap Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 33,33% dari target Rencana Strategis BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada keaktifan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penyampaian Hasil Identifikasi

Penyampaian Hasil Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Padaidi dilakukan melalui melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor B.1091/DJPKRL.5/PRL.440/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KOMPAK melalui:

- SP Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 uraian Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Padaidi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket.
- BAPB No. 45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAST No.45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAP No.45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

c. Serah Terima Bantuan

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Padaidi dari Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Juni 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kompresor, satu unit kamera underwater dan satu unit housing underwater dengan nilai sebesar Rp. 98.235.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.1578/BPSPL.2/PRL.440/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.



Gambar 3.1.7-2. Serah Terima Bantuan KOMPAK

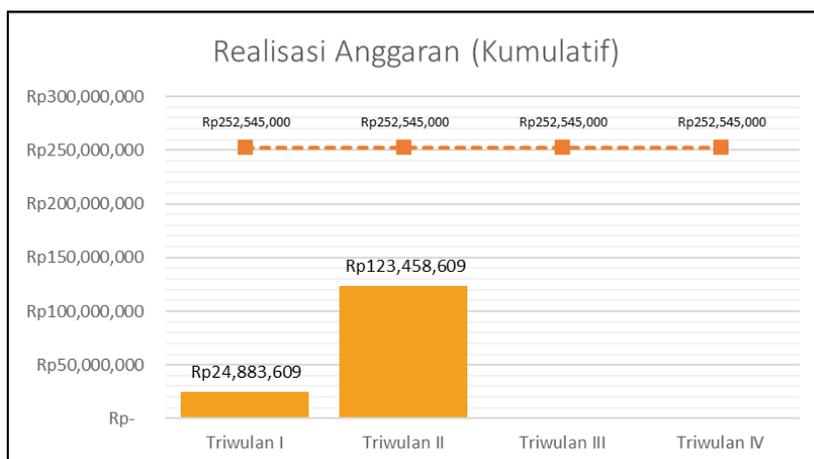
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp 252.545.000	Rp123,458,609 (48,88%)	-
TOTAL		Rp 252.545.000	Rp123,458,609 (48,88%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 123.458.609 atau 48,88% dari pagu anggaran sebesar Rp 252.545.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.



Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Mempersiapkan pengadaan barang untuk bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi di Kalimantan Barat. Melakukan serah terima pemberian bantuan KOMPAK di Kalimantan Barat.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	2	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU “Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru”. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum terdapat progres kegiatan yang dilakukan karena blokir anggaran baru dibuka pada bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada Bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.SCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
TOTAL		Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan identifikasi Kelompok Masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat pemanfaat Kawasan konservasi.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- b. Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

SK-8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-10	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
13	Periode Capaian Tahunan			7	-	9	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Kima (penyediaan data populasi), Karang (pembuatan *Coral* dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Sementara progress kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu untuk 2 jenis berikut: Penyu (penyediaan data populasi), Enumerasi Hiu dan Pari Apendiks (penyediaan data populasi) dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Total progress kegiatan kumulatif yang sudah dilakukan hingga Triwulan II yaitu 5 jenis ikan terancam punah telah dilakukan. Selain itu, pada Triwulan II juga dilakukan Sosialisasi Biota Dilindungi dan/atau terancam punah di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan II tahun 2023 terdapat capaian kumulatif sebesar 5 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 (kumulatif 5 jenis), maka progres kegiatan sama dengan capaian Triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan II sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 25% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan II sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 55% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data populasi penyu, respon cepat mamalia laut terdampar dan sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan pelapor. Selain itu, akses lokasi kejadian biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring penanganan di wilayah kerja sebagai solusi untuk respon cepat biota terdampar

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Survei Penyediaan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Kegiatan penyediaan data populasi penyu di Kalimantan Barat dilaksanakan di Pantai Sungai Belacan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 9 s.d. 14 Mei 2024. Sebelum survei, dilakukan koordinasi dengan anggota kelompok masyarakat Wahana Bahari Paloh. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Pantai Tanjung Api yang merupakan sekretariat atau Pos monitoring penyu dari Kelompok Masyarakat Pengawas Kambau Borneo. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.



Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Survey pendataan populasi penyu dilakukan dengan penyisiran tepi pantai pada malam hari yang dibagi menjadi 8 sektor dengan jarak antar sektor berkisar 500 meter. Pada saat melakukan monitoring penyu yang naik ke pantai pada umumnya ditemukan penyu di sektor 3 sampai dengan sektor 7, tetapi ada juga ditemukan penyu yang naik bertelur pada sektor 1. Penyu yang naik biasanya ditemukan 1 sampai 4 ekor setiap malamnya. Terdapat lebih dari 10 sarang hasil relokasi dengan jumlah telur per sarang

diantara 71 – 138 butir yang diperkirakan akan menetas sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Pesisir Paloh. Jenis penyu yang sarangnya direlokasi adalah penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.

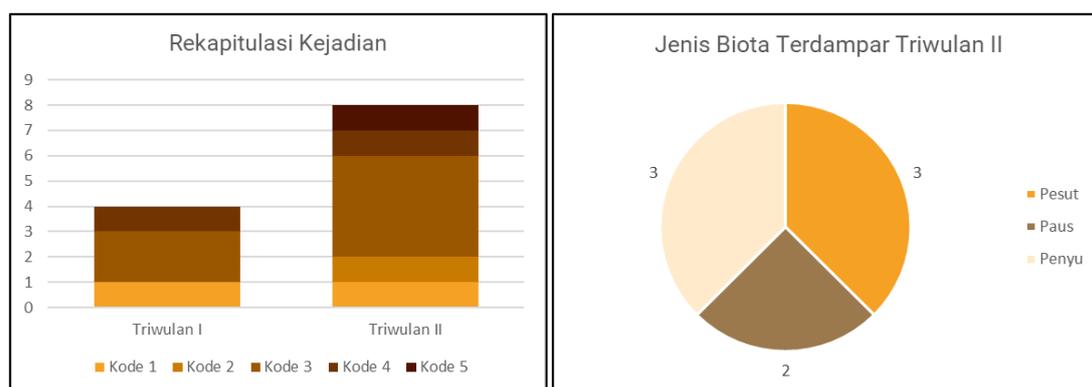
b. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah

➤ Respon cepat penanganan biota laut dilindungi/terancam punah

Selama periode April hingga Juni 2024 tercatat 8 (delapan) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Terdapat 3 (tiga) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilakukan penanganan yaitu pesut sebanyak 3 ekor, penyu sebanyak 3 ekor dan paus sebanyak 2 ekor. Sebanyak 1 (satu) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1), 6 (enam) kejadian merupakan biota dengan kondisi mati (kode 2, 3 dan 4) dan 1 (satu) kejadian sudah menjadi kerangka (Kode 5). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada sekitar lokasi penemuan.



Gambar 3.1.8-2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar



Gambar 3.1.8-3. Grafik Penanganan Biota Terdampar

➤ Sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah

Kegiatan Sosialisasi Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2024 di Politeknik Negeri Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh pegiat konservasi serta akademisi yang ada di KKPD Kendawangan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa hal terkait pentingnya menjaga kelestarian hidup biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah.



Gambar 3.1.8-4. Sosialisasi Biota Dilindungi

➤ *Bimbingan teknis penanganan biota laut dilindungi/terancam punah*

Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampat diselenggarakan pada tanggal 5-6 Juni 2024 di kahyangan Resort, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan paparan, diskusi dan praktek dengan mengundang beberapa stakeholder terkait. Kegiatan ini bekerja sama dengan USAID Kolektif sebagai pemateri dalam bimbingan teknis penanganan biota laut dilindungi/terancam punah.



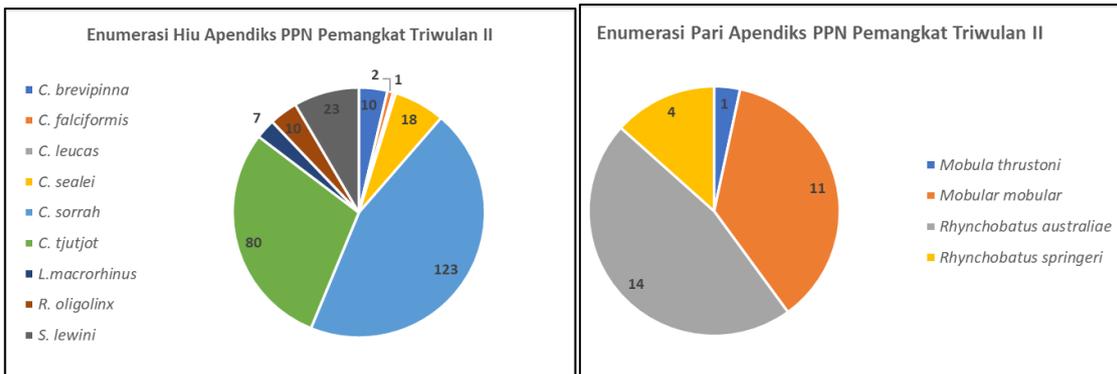
Gambar 3.1.8-5. Bimtek Penanganan Biota Dilindungi

c. Enumerasi/Pendataan Hiu Pari Apendiks

Kegiatan penyediaan data hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan April – Juni 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap lokasi:

➤ *Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPN Pemangkat pada periode April – Juni, didapatkan 9 jenis hiu apendiks sebanyak 274 ekor dan 4 jenis pari apendiks sebanyak 30 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus sorrah* sebanyak 123 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Rhynchobatus springeri* sebanyak 14 Ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus leucas* sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Mobula thrustoni* sebanyak 1 ekor.



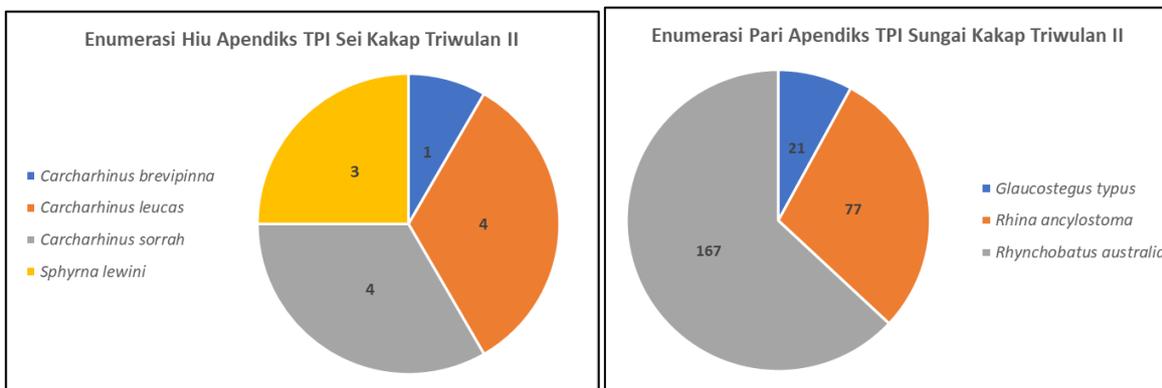
Gambar 3.1.8-6. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat



Gambar 3.1.8-7. Dokumentasi pengukuran

➤ *Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap pada periode April – Juni, didapatkan 4 jenis hiu apendiks sebanyak 12 ekor dan 3 jenis pari apendiks sebanyak 265 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus sorrah* sebanyak 4 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Rhynchobatus australiae* sebanyak 167 Ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus brevipinna* sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Glaucostegus typus* sebanyak 21 ekor.

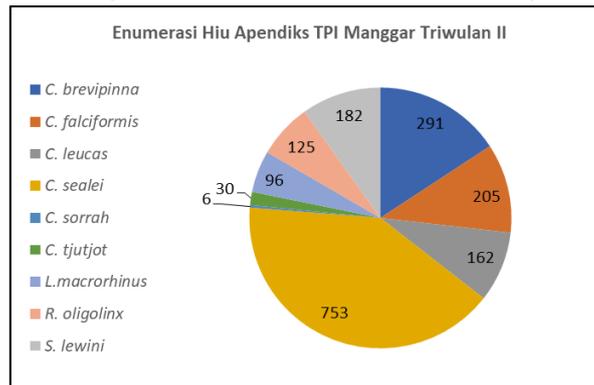


Gambar 3.1.8-8. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

➤ *Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPI Manggar*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPI Manggar pada periode April – Juni, didapatkan 9 jenis hiu apendiks sebanyak 1.850 ekor dan 1 jenis pari apendiks sebanyak 34 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus tjtjtjot* sebanyak 753 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang

ditemukan yaitu *Rhynchobatus australiae* sebanyak 34 Ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus leucas* sebanyak 6 ekor.



Gambar 3.1.8-9. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar



Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Pengukuran

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.8-2. Realisasi IKU 10 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp 213,401,000	Rp 116,876,980 (54,77%)	-
2.	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp 135,615,000	Rp 122,286,488 (90,17%)	-
3.	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp 56,612,000	Rp 32,801,012 (57,94%)	-
4.	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp 344,372,000	Rp 101,041,912 (29,34%)	-
TOTAL		Rp 750.000.000	Rp373,006,392	-

		(49,73%)	
--	--	-----------------	--

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp373,006,392 atau 49,73% dari pagu anggaran sebesar Rp 750.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.



Gambar 3.1.8-11. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melaksanakan kegiatan sosialisasi biota dilindungi/terancam punah, survei pendataan populasi terubuk di Kalimantan Barat, survei pendataan populasi penyu di Kalimantan Barat dan mengikuti kegiatan Festival Pesisir Paloh di Kalimantan Barat.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK-9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan			4	-	5	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan II Tahun 2024 yaitu pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 5 jenis ikan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Teripang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver). Selain itu, dilakukan Survei Pemanfaatan Teripang di Kalimantan Barat dan Sosialisasi Pelayanan Perizinan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berperan sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berperan sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi secara daring (*online*) dalam rangka penerbitan dokumen angkut jenis ikan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan (Januari – Maret). Kegiatan ini terdiri dari:

➤ Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI

pada Triwulan II terdapat 6 pelaku usaha yang melakukan permohonan verifikasi SIPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi*

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan II terdapat total 87 Surat Rekomendasi dengan 84 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 3 surat ke luar negeri (LN). Untuk jenis hiu dan pari *look alike species*, sebanyak 57 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 30 Surat Rekomendasi untuk jenis teripang telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk hiu dan pari *look alike* terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk teripang terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 surat.



Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

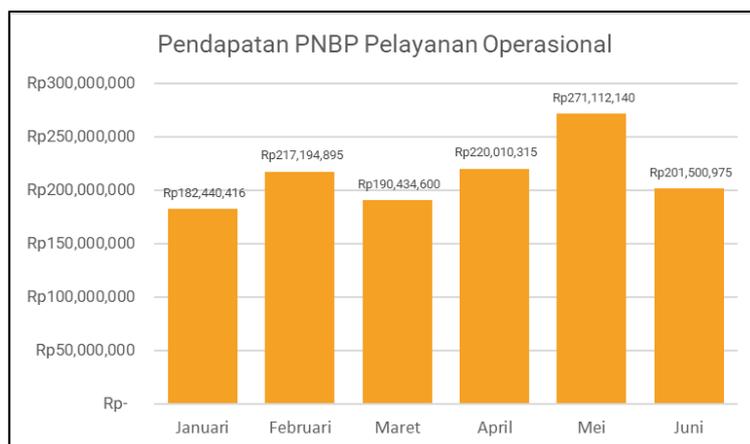
➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)*

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan II terdapat 38 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 711 SAJI DN untuk jenis Arwana telah diterbitkan. Penerbitan SAJI DN untuk hiu dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 19 surat. Sementara penerbitan SAJI DN untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 707 surat.



Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI

- *Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)*
 Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEBP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan II terdapat 314 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 311 surat.
- *Verifikasi Stok Ikan*
 Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan.
- *Verifikasi Hasil Panen*
 Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan.
- *Pengesahan Sertifikat Hasil Pemanenan*
 Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa Sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak
- *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*
 Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan II (Kumulatif) sebesar Rp1.282.693.341. Total PNBP yang diterima pada April – Juni sebesar Rp692.623.430. Nilai PNBP tertinggi pada Triwulan II didapatkan pada bulan Mei sebesar Rp271.112.140, sementara terendah didapatkan pada bulan Juni sebesar Rp201.500.975.



Gambar 3.1.9-3. Grafik Pendapatan PNBP

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.9-2. Realisasi IKU 11 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.002.051] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp 200.000.000	Rp 23,521,931 (11,76%)	-
2.	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp 1.100.000.000	Rp 303,873,016 (27,62%)	-
TOTAL		Rp 1.300.000.000	Rp327,394,947 (25,18%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 327,394,947 atau 25,18% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.300.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Juli – September 2024.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak

SK-10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	5	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan II yaitu persiapan verifikasi perizinan Air Laut Selain Energi (ALSE).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 lokasi kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh keaktifan pemohon dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kelautan dan melakukan sosialisasi perizinan berusaha bidang jasa kelautan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu persiapan verifikasi perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Namun, tidak ada permohonan verifikasi perizinan pemanfaatan ALSE di wilayah BPSPL Pontianak pada Triwulan II sehingga tidak terdapat kegiatan lapangan.

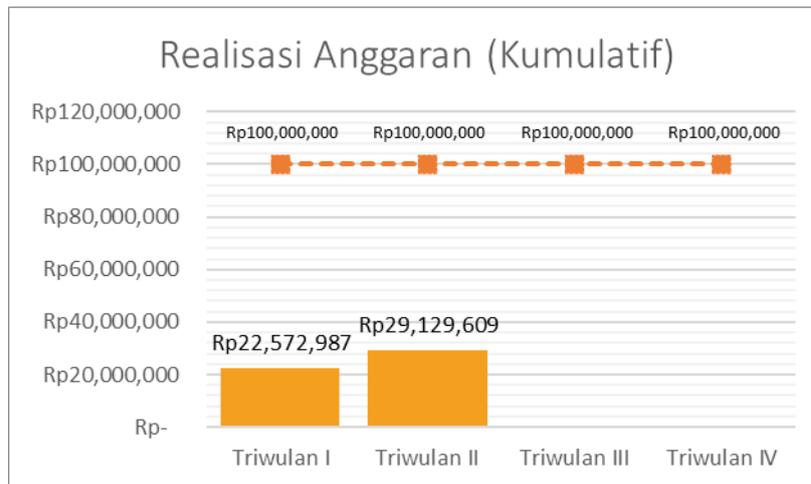
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2363.PBW.002.052] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp 100.000.000	Rp 29,129,609 (29,13%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 22.572.987 (29,93%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 29,129,609 atau 29,93% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.10-1. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) apabila ada pengajuan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK-11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			4	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya: identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gernas BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak” merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPRKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-2. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jeruju Besar	KUB Galak Super	10
	KUB Kakap Merah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prospek usaha pengelolaan sampah oleh mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

➤ Kegiatan Penimbangan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 23.461,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.863.000. KUB Berembang Laut II menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.875,2 kg.



Gambar 3.1.11-2. Grafik data pengumpulan sampah

b. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-3 Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapuk Besar	KUB Surya Perdana	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mutiara	11
Kel. Naram	KUB Naram Jaya Abadi	22
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bawal	10
	KUB Barakuda	10

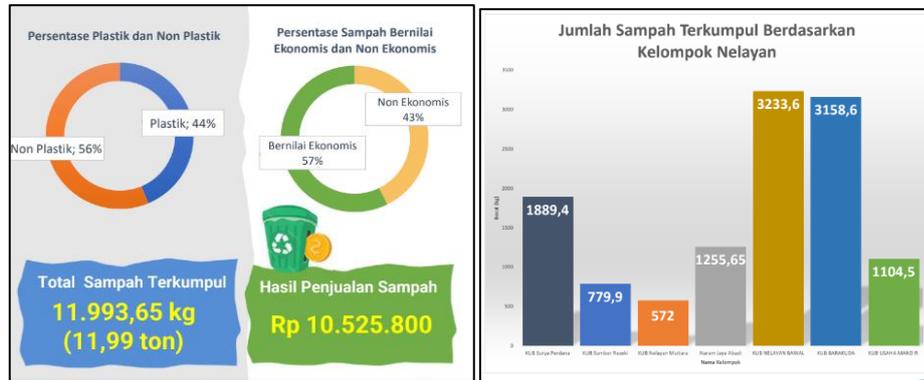
➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 15 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.993,65 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 57% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.525.800. KUB Nelayan Bawal menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.233 kg.



Gambar 3.1.11-4. Grafik data pengumpulan sampah

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-4. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Bakau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Citra Lestari	34
Desa Bawah Layung	KUB Bina Harapan Bersama	6

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.860,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 2.393 kg sampah berupa residu dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.11-6. Grafik data pengumpulan sampah

d. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggang sebanyak 80 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-5. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sepinggang	KUB Minasari	26
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Seraya	18
	KUB Lee Batakan Fajar	12
	KUB Anugrah Sinergi	12

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, analisis usaha pengelolaan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

8. Realisasi Anggaran

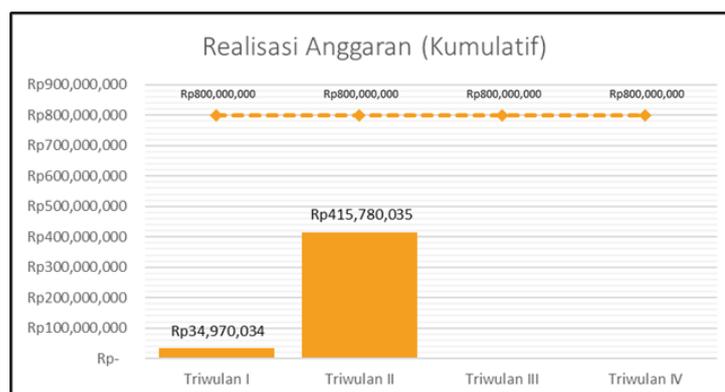
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitas Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-6. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 415.780.035 (51,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp415.780.035 (51,97%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp Rp415.780.035 atau 51,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1.11-8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan kegiatan evaluasi dan penutupan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan penutupan dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gernas BCL dengan melibatkan nelayan lokal, instansi daerah dan *stakeholder* lain yang terkait.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Delapan indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
93,03	82	92,55	112,86	93,76	98,71	90	102,3	90	102,3	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak pada Triwulan II didapatkan nilai sebesar 92,55 dengan kategori baik. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan nilai masing-masing indikator sebagai berikut: Revisi DIPA (10,00), Deviasi Halaman III DIPA (13,04), Penyerapan Anggaran (18,75), Belanja Kontraktual (10,00), Penyelesaian Tagihan (10,00), Penyelesaian UP dan TUP (9,24) dan Capaian Output (21,52).

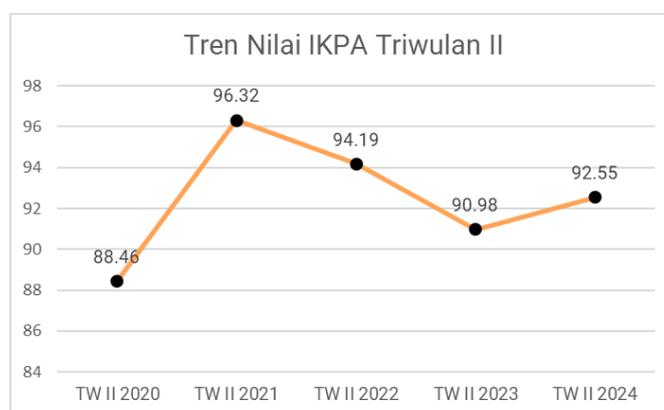
Secara umum capaian pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 telah melebihi dari target 82 pada periode tersebut (112,86%). Capaian ini juga telah melebihi target pada Renstra BPSPL Pontianak untuk tahun 2024 yaitu 90 (102,3%), dan Renstra DJPRL untuk tahun 2024 yaitu 90 (102,3%). Namun, capaian pada triwulan II/semester 1 belum dapat mencapai target PK BPSPL Pontianak Tahun 2024 yaitu 93,76 atau sekitar 98,71%. Capaian IKM 14 disampaikan melalui Nota Dinas Biro Keuangan KKP Nomor 2161/SJ.2/KU.130/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2024 (Sumber: Setjen KKP, 10 Juli 2024).

Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output
100,00	86,91	93,73	100,00	100,00	92,43	86,08
10	15	20	10	10	10	25
10,00	13,04	18,75	10,00	10,00	9,24	21,52
93.46		96.54				86.08

Gambar 3.1.12-1. Nilai IKPA Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 adalah 92,55 (112,86% dari target semester sebesar 82 dan 98,71% dari target tahunan sebesar 93,76), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah 90,98 (97,04% dari target tahunan 93,75). Sehingga capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 mengalami peningkatan 1,67% dibandingkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023.



Gambar 3.1.12-2. Tren Nilai IKPA

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 102,3% (92,55 dari 90). Sehingga capaian

tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 90 untuk tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 102,3% (92,55 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, tim pengelola keuangan melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Revisi DIPA
 - Revisi Halaman III DIPA pada 22 April 2024 (Revisi ke 5)
 - Revisi Kewenangan KPA pada 29 April 2024 (Revisi ke 6)
 - Revisi Kewenangan Kanwil pada 3 Juni 2024 (Revisi ke 7)
 - Revisi Kewenangan DJA pada 11 Juni 2024 (Revisi ke 8)
- b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp8.279.084.471 atau 44,52% dari pagu anggaran sebesar Rp18.598.113.000 (Sumber Data: OMSPAN per 30 Juni 2024)
- c. Data Kontrak sebanyak 9 kontrak pada April – Juni 2024
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop Sebanyak 2 Paket sesuai Kontrak No.SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 1 April 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Drawer, dan Lemari Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 1 April 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak No.SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 23 April 2024.

- Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SPK.45/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 30 April 2024.
 - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Padaidi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.47.BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.51/BPSPL.2/SPK/PPK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- d. Penyelesaian Tagihan setiap bulan
- e. Penyelesaian UP sebanyak 2 kali dan TUP 3 kali
- f. Pengisian Capaian Rincian Output (CRO) periode April – Juni 2024
- g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran
- Workshop IKPA “Optimalisasi Capaian IKPA TA 2024, Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I, Optimalisasi Penyerapan Anggaran serta Identifikasi Satker pada 2 s.d. 4 April 2024 di Jakarta.
 - Pembahasan Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi Lingkup DJPKRL Tahun 2024 pada 22 April 2024
 - Tindak lanjut Usulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BPSPL Pontianak Tahun 2024.
 - Finalisasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL tahun 2024 pada 8 Mei 2024 secara daring.
 - Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 Audited Satuan Kerja BPSPL Pontianak.
 - Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan Belanja Bahan, Barang Konsumsi, Persediaan Dijual/Diserahkan ke Masyarakat dan Properti Investasi atas Penerapan PIPK Tahun 2024 pada 3 s.d. 6 Juni 2024 di Jakarta Pusat.
 - Penyampaian Penyusunan Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Tabel A) dan atau Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian (Tabel A1).
 - Reviu atas Penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A1) PIPK Tahun 2024 Lingkup DJPKRL pada 11 s.d. 13 Juni 2024 di Yogyakarta.

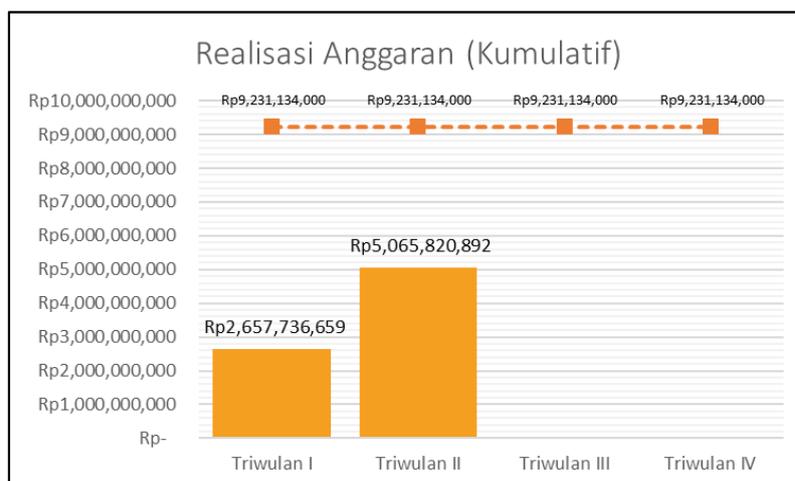
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp 43.800.000	Rp 340.000 (0,78%)	-
2.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp 52.000.000	Rp 13,587,671 (26,13%)	-
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 6.297.000.000	Rp 3,426,726,536 (54,42%)	-
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.704.534.000	Rp1,575,373,682 (58,25%)	-
5.	[2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp 133.800.000	Rp 49,793,003 (37,21%)	-
TOTAL		Rp 9.231.134.000	Rp5,065,820,892 (54,88%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 5,065,820,892 atau 54,88% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.231.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan KPA)
- Pelaksanaan kontrak pengadaan
- Penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran
- Pengisian CRO bulan Juli – September 2024

IKM 15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau

program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 – 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 – 80 ;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
88	Periode Capaian Tahunan			86	-	89	-	89	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu nilai NKA sebesar 89 pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKM dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 90 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan II dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKM ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung/periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan input Capaian Rincian Output (CRO) bulan April – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Semester I tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
- Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
- Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
90,81	Periode Capaian Tahunan			75	-	90	-	90	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan II Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan II Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis

efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Januari – Juni 2024.
- Audit internal penerapan sistem manajemen mutu pada tanggal 13 Februari 2024 secara *hybrid* di Kantor BPSPL Pontianak dan *zoom meeting*.

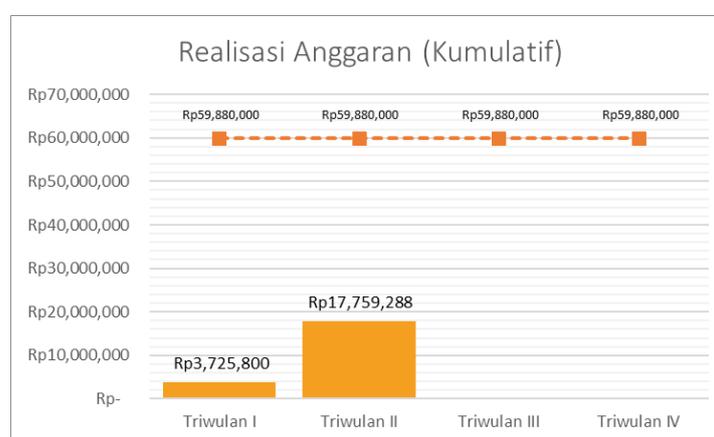
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp 59.880.000	Rp17,759,288 (29,66%)	-
TOTAL		Rp 59.880.000	Rp 3.725.800 (29,66%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp17,759,288 atau 29,66% dari pagu anggaran sebesar Rp 59.880.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang WBK dan Konsumsi Rapat.



Gambar 3.1.12-4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan III yaitu pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk bulan April – Juni dan sosialisasi/internalisasi pembangunan Zona Integritas di BPSPL Pontianak.

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25%
- b. Kompetensi memiliki bobot 40%
- c. Kinerja memiliki bobot 30%
- d. Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan Indikator tersebut diambil langsung dari *dashboard* IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
	90,84	83	85,12	102,55	88	96,72	76	112	76	112

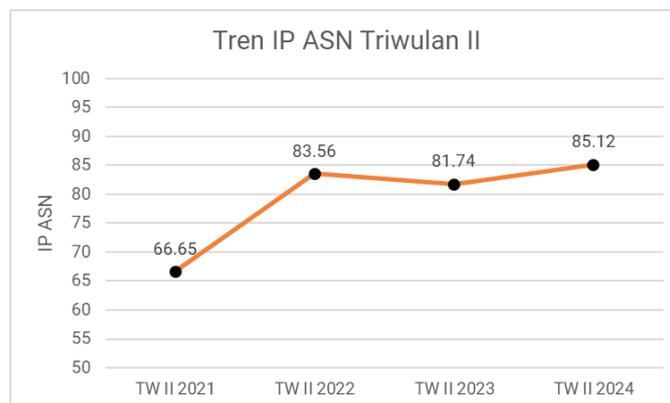
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024, IKM 17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak telah tercapai 85,12 (102,55%) dari target 83. Capaian IKM 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.4034/DJPKRL.1/KP.720/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PKRL (Sumber: Setditjen PKRL 15 Juli 2024). Adapun capaian IKM 17 pada triwulan ini belum dapat mencapai target pada PK BPSPL Pontianak tahun 2024 yaitu 88 (96,72%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 adalah 85,12 (96,72% dari target tahunan 88), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah 81,74 (98,48% dari target tahunan 83). Sehingga capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,38% dibandingkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023.



Gambar 3.1.12-5. Tren IP ASN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 112% (85,12 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 112% (85,12 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis

efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada April – Juni 2024, diantaranya adalah:
 - Rapat Kerja Teknis Tahun 2024 pada 24 s.d. 25 April 2024 di Semarang.
 - Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pemetaan Habitat Dasar Perairan Dangkal pada 6 s.d. 7 Mei 2024 di Bogor.
 - Pelatihan Permodelan Numerik Perubahan Garis Pantai pada 8 s.d. 9 Mei 2024 di Makassar.
 - Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 14 s.d.15 Mei 2024 di Bandung.
 - Pelatihan Identifikasi Ikan Hiu dan Pari “Biologi dan Ekologi Ikan Pari” pada 28 Mei 2024 secara daring.
 - Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pada 29 Mei 2024 secara daring.
 - Orientasi Kehumasain “Mengasah Keterampilan, Memperkuat Reputasi” pada 11 s.d. 13 Juni 2024 di Yogyakarta.
 - Training Eksklusif Coastal Engineering: Pemodelan Hidronamik dan Sedimen dengan Software Delft3D pada 15 s.d. 16 Juni 2024 secara daring.
- b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada April – Juni 2024 dan Monitoring Triwulan II 2024.
- c. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada April – Juni 2024.
- d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada April – Juni 2024.
- e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada April – Juni 2024.

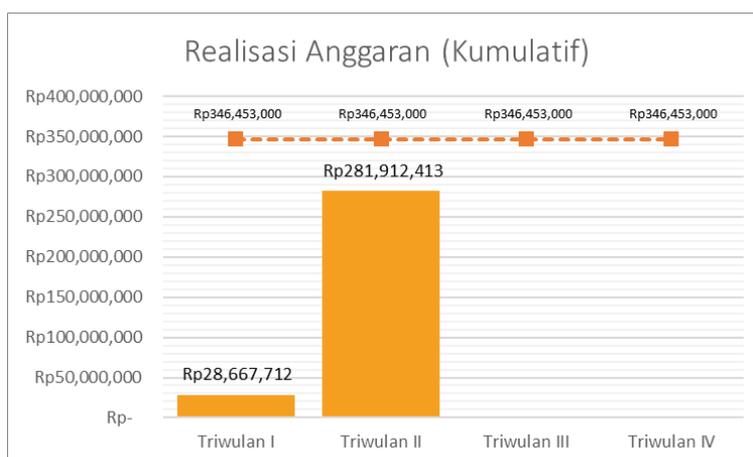
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp346,453,000	Rp281,912,413 (81,37%)	-
TOTAL		Rp346,453,000	Rp281,912,413 (81,37%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp346,453,000 atau 81,37% dari pagu anggaran sebesar Rp346,453,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan.



Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu:

- Rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- Rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai.
- Rekapitulasi dan monitoring Presensi Pegawai serta mengikuti pelatihan, bimtek, seminar ataupun *workshop* yang diselenggarakan baik dari BPSPL Pontianak maupun oleh pihak luar.

IKM 18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
88,2	Target Capaian Tahunan			81	-	-	-	83,75	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PKRL sebesar 83,75. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 92. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal itu didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Monev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat pada tanggal 1 s.d.4 April 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.1882/DJPKRL.1/TU.330/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
- b. Mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis DJPKRL Tahun 2024 pada 24 dan 25 April 2024 di Padma Hotel, Semarang sesuai Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2179/DJPKRL.1/TU.330/IV/2024 tanggal 18 April 2024.

- c. Melakukan penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1226/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
- d. Mengikuti kegiatan Ekspose Kegiatan Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelayanan Teknis Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 pada 29 dan 30 April 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Inspektur Nomor B.58/ITJ.330/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
- e. Mengikuti kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024 Lingkup DJPKRL pada 18 s.d. 19 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2120/DJPKRL.1/TU.330/IV/2024 tanggal 16 April 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I tahun 2024, didapatkan hasil capaian kinerja 115 (Istimewa).
- f. Mengikuti kegiatan Forum Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.1214/SJ.1/RC.610/V/2024 tanggal 10 Mei 2024.
- g. Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 9/BPSPL.2/TU.210/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.
- h. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2953/DJPKRL.1/RC.610/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan surat tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115 (Istimewa) dan NKO Verifikasi sebesar 115 (Istimewa).
- i. Mengikuti kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di lingkungan DJPKRL pada tanggal 24 – 27 Juni 2024 di Kab. Sleman sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL Nomor B.3440/DJPKRL.1/RC.610/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai PM SAKIP sementara sebesar 81,75. Nilai ini telah mencapai target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, namun masih menurun dibandingkan nilai tahun lalu. Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen tambahan dalam rangka menambah nilai SAKIP hingga ditetapkan pada saat pleno.



Gambar 3.1.12-7. Kegiatan Evaluasi AKIP

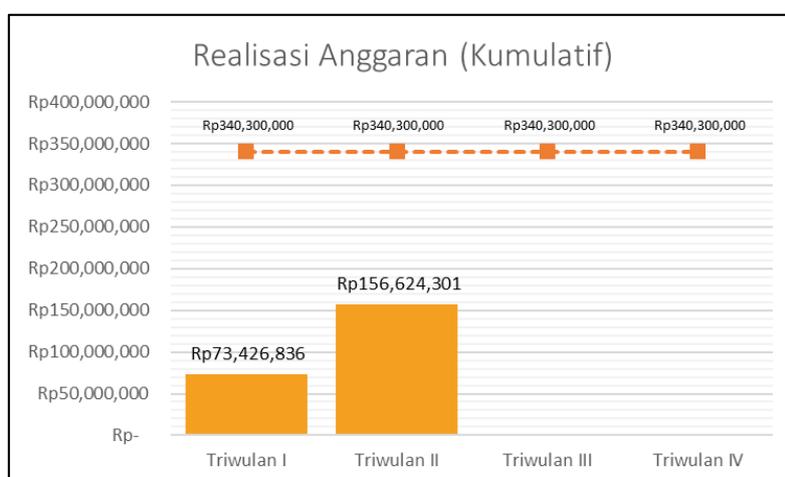
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 97.000.000	Rp 65,673,277 (67,70%)	-
2.	2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 109.500.000	Rp 41,158,021 (37,59%)	-
TOTAL		Rp340,300,000	Rp156,624,301 (46,03%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp156,624,301 atau 46,03% dari pagu anggaran sebesar Rp340,300,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.12-8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan III tahun 2024, pembahasan pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan III tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.12-11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
4	2	2	100	4	50	-	-	3	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 telah tercapai 2 (dua) dokumen (100%) dari target 2 (dua) dokumen. Capaian IKM 19 berdasarkan:

- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023; dan
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1123/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah sama/sebanding meliputi 2 (dua) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 dengan jumlah 2 (dua) dokumen telah berkontribusi 50% dari Target Renstra BPSPL Pontianak. Tidak terdapat target pada Renstra BPSPL Pontianak 2020 - 2024. Pemenuhan dokumen telah berkontribusi pada pemenuhan target PK BPSPL Pontianak Tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target triwulan II/semester 1 tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (minggu pertama setelah triwulan berakhir), maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Triwulan I tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu sebelum tanggal 20 April 2024 (berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2074/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.12-12. Efisiensi dari capaian IKM 19 Triwulan II

Indikator Kinerja Kegiatan	NPSS (%)	Alokasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	100	24.500.000	0	0	100

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Pembahasan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 secara daring pada 23 April 2024.
- Pendataan Hasil Pemantauan Kegiatan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko Tahun 2024.
- Pembahasan Pendataan Pemantauan MR TA 2024 secara daring pada 29 Mei 2024.
- Persiapan Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 7 Juni 2024.
- Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1123/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024.
- Pelaporan penyelenggaraan SPIP Bulan April Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1325/BPSPL.2/TU.140/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan April Tahun 2024.
- Pelaporan penyelenggaraan SPIP Bulan Mei Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1615/BPSPL.2/TU.140/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Mei Tahun 2024.
- Ikut serta pada Webinar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada 16 Mei 2024 secara daring.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM 19 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp24.500.000 atau 0% dari pagu anggaran Rp24.500.000.

Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.D] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp24.500.000	Rp0 (0%)	-
TOTAL		Rp24.500.000	Rp0 (0%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan III adalah:

- Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024, serta melakukan publikasi Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024.
- Menyusun Laporan SPIP Bulan Juli, Agustus, dan Triwulan III Tahun 2024

IKM 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office* KKP pada laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5.
- b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
- c. Konten video/*campaign* diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:

- Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II
- Sesditjen PRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKM MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
	116,65	94	116,67	120	94	120	90	120	90	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 116,67% dari target nilai 94. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPRL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Lebih lanjut pada tahun 2023 target meningkat sebanyak 2 poin dari tahun 2023 yaitu dari 92 menjadi 94. Pada triwulan II/semester 1 target MP 94 dan telah tercapai 100% dari target triwulanan dengan persentase capaian 124,11%. Capaian MP pada Triwulan II 2024 sebanding dengan capaian MP Triwulan II 2023 yaitu 100%. Capaian IKM 20 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2075/DJKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Penyampaian Capaian

Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 yaitu 116,67 (124% dari target triwulanan 94), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 yaitu 100 (108,70% dari target triwulanan 92). Artinya terdapat kenaikan capaian MP pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 sebesar 15,3%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (116,67 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKRL

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (116,67 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 116,67% (124,11% dari target triwulanan 94). Hal itu didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pekegiatan pendukung dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP. Dokumentasi kegiatan rapat/seminar yang diunggah telah dilengkapi dengan foto dan notulensi serta narasi 5W1H.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan III yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP pada Juli – September 2024.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan IIV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerja sebesar 120%.

Tabel 3.1.12-15. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	80	100	120	80	120	80	120	80	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024, IKM 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah tercapai 100% (120%) dari target 80. Capaian IKM 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.3970/DJPKRL.1/HP.470/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PKRL" Triwulan II Tahun 2024 (Sumber: Setditjen PKRL 11 Juli 2024). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 adalah 100% (120% dari target triwulan 80%), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah 100% (120% dari target triwulan 75). Sehingga capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 sama dengan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi atas Audit Kinerja TA. 2023-2024 dengan Nomor T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024 pada tanggal 9 Maret 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 9 dimana 9 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan unggah dokumen pada SIDAK.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-21	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	≤1	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan II belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan II.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan II.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan III.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpetasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan

5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut
----	---	------	--

Capaian IKM 23 Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-18. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			80	-	72,5	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan dan melakukan koordinasi terkait dengan Monitoring dan Evaluasi KOMPAK.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKM tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 72,5% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan II.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Melakukan inventarisasi Kelompok Masyarakat yang telah menerima Bantuan KOMPAK dari BPSPL Pontianak
- Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran per Klasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.052] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp 47.455.000	Rp 8.862.437 (18,28%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 8.862.437 (18,28%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.862.437 atau 18,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.12-9. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencanan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu memeriksa kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.12-21. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak

SK-12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Target Capaian Tahunan			65	-		-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam penyampaian Revisi DIPA dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM yaitu:

- Rapat terkait Rencana Aksi Penyelamatan Arsip Kemaritiman secara daring pada 4 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.2903/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Bimbingan Teknis Alih Media Arsip secara daring pada 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.3119/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Undangan Bimbingan Teknis Alih Media Arsip.
- Uji Coba Menu Pemberkasan Kearsipan secara daring pada 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Plh. Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.3304/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.862.437 atau 18,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Tabel 3.1.12-22. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 38.250.000	Rp 1.900.000 (6,22%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 1.900.000 (6,22%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan III.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagian besar Indikator Kinerja diukur secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang diserahkan, BPSPL Pontianak memiliki capaian 1 kelompok dari target 1 kelompok (100%), jika dibandingkan dengan Unit Kerja lain, capaian BPSPL Pontianak termasuk terendah. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak menjadi yang terendah diantara Unit Kerja lain dengan nilai 92,55. Capaian IKU IP ASN BPSPL Pontianak sebesar 85,12 menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan capaian Unit Kerja lain. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PKRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar oleh BPSPL Pontianak menjadi yang terendah diantara unit kerja lain dengan nilai sebesar 116,67% sementara unit kerja lain mendapatkan nilai 133, 33%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100%.

Tabel 3.1.12-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain

No	IKU	BPSPL Pontianak	BPSPL Padang	BPSPL Makassar	BPSPL Denpasar	LPSPL Serang	LPSPL Sorong
1	Nilai PNBP BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Periode Pengukuran Tahunan					
4	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Tidak ada				
5	Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	Periode Pengukuran Tahunan					
6	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
7	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
8	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	1	-	-	-	-	-
9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru	Periode Pengukuran Tahunan					
10	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	2				

No	IKU	BPSPL Pontianak	BPSPL Padang	BPSPL Makassar	BPSPL Denpasar	LPSPL Serang	LPSPL Sorong
11	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak	92,55	99,27	100,00	99,31	95,73	97,97
15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak	85,12	90,92	91,92	86,39	88,15	89,82
18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak	1	1	1	1	1	1
20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	116.67	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					
24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan					

3. 3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA 032.07.2.477425/2024 dengan pagu anggaran sebesar **Rp 18.598.113.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/> . Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp 8.279.084.471** atau **44,52%** dari pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi per-kegiatan sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23.1.12-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan II

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	5,876,306,000	1,738,559,610	29,59	-
2.	(2363) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100,000,000	29,129,609	29,13	-
3.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	1,150,000,000	293,021,587	25,48	-
4.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	10,671,807,000	5,802,593,630	54,37	-
5.	(4346) Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800,000,000	415,780,035	51,97	-
Total			18,598,113,000	8.279.084.471	44,52	

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 30 Juni 2023

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.122-3.1.12-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Triwulan II	6.297.000.000	3.896.354.093	61,88
5.	(52) Barang	Triwulan II	11.508.113.000	5.510.533.865	47,88
9.	(53) Modal	Triwulan II	793.000.000	406.262.322	51,23

(*) *Blokir Anggaran*

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 30 Juni 2024)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Juni/Triwulan II) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 33,86%, untuk belanja barang sebesar 61,88% dan untuk belanja modal 4,26%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan II sebesar Rp 3.896.354.093 (61,88%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 PNS
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan II sebesar Rp 11.508.113.000 atau 47,88% dari pagu anggaran Rp 11.508.113.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 793.000.000 (51,23%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop Sebanyak 2 Paket sesuai Kontrak No.SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 1 April 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Drawer, dan Lemari Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 1 April 2024.
 - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak No.SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 23 April 2024.

- Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SPK.45/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 30 April 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Padaidi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.47.BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.51/BPSPL.2/SPK/PPK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Hasilnya terlihat bahwa sebagian besar dari target-target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan II telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 jika dilihat dari nilai **NPSS IKU+IKM** dari aplikasi *kinerjaku* sebesar **105,94%** dengan kategori **Baik**. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan II 2024 sebesar **Rp 8.279.084.471** atau **44,52%** dari pagu anggaran sebesar Rp 18.598.113.000. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan II ini sebagai berikut:

1. Penyerahan Bantuan kompak dengan capaian sebanyak **1 kelompok** dari target 1 kelompok sehingga tercapai **100%**.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian sebesar **92,55** dari target sebesar 82 sehingga tercapai **112,87%**.
3. Nilai IP ASN dengan capaian sebesar **85,12** dari target sebesar 83 sehingga tercapai **102,55%**.
4. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 1 laporan sehingga tercapai **100%**.
5. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian **116,67** dari target 94 sehingga tercapai **120%**.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian **100%** dari target 80% sehingga tercapai **120%**.

Target IKU dan IKM yang memiliki target pada Triwulan II tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan II masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 18 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti yaitu mengusahakan untuk buka blokir anggaran pada REA.003. Anggaran sudah dibuka pada bulan Juni dan berubah menjadi SCC.001. Selain itu juga telah dilakukan pengumpulan sertifikasi bimbingan teknis, diklat dan seminar lingkup BPSPL Pontianak dalam rangka peningkatan kualifikasi IP ASN.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.